

Artikel

Gerakan Mahasiswa Menentang Pemerintah: Terbentuknya Satu Generasi Baru

Amiruddin

Perkumpulan ELSAM, Jakarta

Email: amiruddin.alrahab@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia yang semakin masif dan lintas kampus. Gerakan mahasiswa diposisikan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang muncul ketika demokrasi melemah, kondisi ekonomi stagnan, dan oposisi formal mengecil. Faktor pendorong utamanya adalah pelemahan KPK, pengesahan undang-undang secara kilat seperti UU Cipta Kerja, serta praktik politik dinasti melalui Mahkamah Konstitusi. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan yang stagnan pada angka 5% per tahun dinilai tidak mampu menyerap tenaga kerja baru, sehingga memunculkan keresahan mahasiswa sebagai calon pencari kerja. Dalam konteks politik, DPR dipersepsikan tidak independen karena dominasi presiden terhadap partai politik, sehingga mahasiswa mengambil peran oposisi jalanan dengan aksi demonstrasi, membangun jaringan intra dan ekstra kampus, serta bekerja sama dengan elemen masyarakat lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa telah menjadi kekuatan politik oposisi non-formal yang berupaya mengoreksi pelemahan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di pemerintahan Indonesia saat ini.

Kata kunci: gerakan mahasiswa, kelompok penekan, demokrasi, ekonomi politik, oposisi

Abstract

This article examines the dynamics of student movements in Indonesia, which have become increasingly massive and cross-campus. Student movements are positioned

as pressure groups that emerge when democracy weakens, the economy stagnates, and formal opposition diminishes. Key driving factors include the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK), the rapid passage of laws such as the Omnibus Law on Job Creation, and the practice of political dynasties facilitated by the Constitutional Court. Economically, the stagnant growth rate of 5% per year has been perceived as insufficient to absorb new labor forces, creating anxiety among students as future job seekers. Politically, the House of Representatives (DPR) is viewed as subordinated to the president due to his dominance over political parties, prompting students to assume the role of a non-formal opposition. They employ street demonstrations, cross-campus networks, and alliances with other societal groups. The article concludes that student movements have become a political opposition force seeking to correct democratic backsliding and economic injustice in the current Indonesian government.

Keywords: student movement, pressure group, democracy, political economy, opposition

Pendahuluan

Mahasiswa kerap melancarkan demonstrasi dan protes terhadap pemerintahan Indonesia. Aksi-aksi protes dan demonstrasi mahasiswa itu muncul di berbagai kota, dengan mengusung berbagai isu, mulai dari kebijakan pemerintahan yang dinilai merugikan masyarakat, sampai pada menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya beberapa permasalahan sosial-politik. Bahkan mahasiswa-mahasiswa itu dalam demonstrasi sampai meminta presiden untuk mundur dari jabatan.

Mahasiswa menempati posisi yang unik dalam masyarakat Indonesia. Keunikan itu terjadi karena mahasiswa dilihat sebagai kaum intelektual (terpelajar). Di sisi lain, mahasiswa dilihat sebagai elite yang akan menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, ketika krisis sosial-politik terjadi, mahasiswa akan selalu menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk bisa keluar dari krisis itu.

Sejarah politik Indonesia juga memperlihatkan keunikan tersebut dalam waktu yang panjang. Paling tidak bisa dicatat, dalam krisis politik tahun 1966, setelah peristiwa September 1965 terjadi, mahasiswa berperan bersama

unsur-unsur kekuatan politik lainnya untuk mendorong terjadinya perubahan politik dan peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto (Raillon, 1989).

Sementara dalam krisis ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar di 1998, yang kemudian menjalar menjadi krisis politik yang berakibatnya jatuhnya kekuasaan Soeharto, mahasiswa kembali berperan mendorong perubahan politik. Terutama mahasiswa berperan melakukan gerakan massa untuk mendesak Soeharto mundur dari jabatan presiden dan menghapus dwifungsi ABRI dalam rangka demokratisasi sistem politik. Gerakan mahasiswa yang memuncak pada Mei 1998 itu kemudian dikenal sebagai gerakan Reformasi (Rizkiandi, 2016).

Di era Jokowi gerakan mahasiswa kembali muncul, baik yang berbasis kampus, maupun yang non-kampus. Bahkan muncul gerakan bersama dalam jaringan antarkampus, dengan identitas BEM Kampus. Serta tidak luput pula organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMNI dan GMKI.

Pertanyaannya mengapa di era pemerintahan sekarang ini, gerakan mahasiswa bisa muncul

sedemikian rupa? Lebih jauh mengapa setelah era Reformasi, yang notabene sistem politik demokratis sudah berjalan hampir 20 tahun, gerakan mahasiswa masih muncul?

Kerangka Teoritis: Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gerakan mahasiswa dilihat sebagai gerakan politik, yang berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Jika diperhatikan perjalanan sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia sejak tahun 1966 sampai sekarang, kelompok-kelompok mahasiswa selalu melakukan aksi-aksi untuk melakukan berbagai tekanan kepada pemerintah dalam situasi yang krisis, sehingga mendatangkan perubahan. Artinya mahasiswa akan memasuki arena politik untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah, ketika muncul persoalan struktural dalam politik dan ekonomi. Hal itu menandai sebagai salah satu kelompok masyarakat yang strategis, maka mahasiswa menjadi kekuatan politik, yang memiliki kepedulian pada perkembangan sosial-politik.

Gerakan kelompok penekan secara politik adalah gerakan yang ditujukan untuk menekan pemerintah dalam rangka mempengaruhi pembuatan kebijakan, undang-undang atau opini publik. Kelompok penekan bisa berupa himpunan atau organisasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama atau dari golongan yang sama. Kelompok penekan dalam aktivitasnya akan selalu mencari dukungan publik dan mempengaruhi opini publik untuk meningkatkan tekanannya kepada pihak pemerintah atau pembuat kebijakan dalam rangka mengubah dan/atau menolak kebijakan negara.

Karakter gerakan mahasiswa seperti itu sesuai dengan pemikiran V.O Key, Jr. Dia memberikan pengertian tentang kelompok

penekan dalam kerangka politik di Amerika sebagai berikut:

“A striking feature of American politik is the extent to which political parties are supplemented by private association formed to influence publik policy. These organization, commondly called pressure group, promote their interests by attempting to influence government rather than by nominating candidates and seeking responsibility.” (Organisasi seperti itu disebut kelompok penekan, menyuarakan kepentingannya dengan mempengaruhi pemerintah, daripada mendominasi kandidat dan mengambil tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan) (Key, 1958).

Kelompok penekan bisa muncul dalam sistem demokrasi, karena sistem ini memberi ruang berpartisipasi kepada elemen-elemen masyarakat untuk bersuara, terlepas dari besar atau kecilnya ruang itu. Dari Key, Jr bisa dikatakan ciri-ciri kelompok penekan, yaitu melakukan aktivitas politik di luar politik formal, sasaran tekanan kelompok penekan adalah pada institusi politik formal dalam rangka mempengaruhi arah dan agenda kebijakan publik, serta kelompok penekan tidak berorientasi pada menominasikan seseorang kandidat untuk meraih jabatan formal. Tiga ciri itulah yang membedakan kelompok penekan dengan partai politik yang menominasikan orang-orang tertentu dalam jabatan eksekutif atau legislatif. Dengan kata lain, kelompok penekan berperan dalam memberikan masukan (*input*) pada sistem politik formal, agar keluarannya (*output*) sesuai dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Lebih jauh kelompok penekan juga bisa dimaknai sebagai kelompok yang mencoba

keluar dari dominasi dan hegemoni aktor-aktor politik formal, seperti partai politik, birokrasi dan elite pemerintahan. Dalam kerangka ini, kelompok penekan bisa juga disebut sebagai kelompok perlawanan.

Penulisan ini dalam mengembangkan argumentasi menggunakan metode kepustakaan (*literature*) dan pemberitaan media massa. Maka dari itu, penulisan ini sangat bersandar pada beberapa kepustakaan yang ada. Kemudian dari data yang diperoleh melalui kepustakaan dan liputan media massa itu diuraikan secara deskriptif untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Fenomena-fenomena yang terjadi tentang gerakan mahasiswa di pemerintahan Indonesia yang dikonstruksikan dari berita-berita media massa yang relevan.

Mahasiswa dalam Konteks Ekonomi dan Politik Nasional

Jika diperhatikan data pada tahun 2022, menurut Kemdikbud-Ristek, jumlah mahasiswa seluruh Indonesia sebesar 9,32 juta orang. Jumlah itu naik 4,2% dari tahun 2021 yang berjumlah 8,96 juta orang. Dari jumlah sebesar itu, 4,49 juta kuliah di PTS, dan 3,38 juta orang kuliah di PTN di seluruh Indonesia. Sementara yang kuliah di jenjang S1 berjumlah 7,83 juta orang, sementara sisanya kuliah di D3, D4, dan pascasarjana. Sementara universitas atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia berjumlah 4.523 (*Sindonews*, 2023).

Sementara itu, data BPS rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan sebelumnya (Jokowi), dalam 10 tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2024, adalah 5%. Di masa pandemi Covid-19, pertumbuhan sampai merosot ke 3,70%. Sementara pada

masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2005-2014) pertumbuhan ekonomi berkisar 6% sampai 6,35%. Sementara, Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2024-2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah ke angka 4,9% (*Bisnis Indonesia*, 2024).

Pertumbuhan ekonomi, sangat menentukan daya serap angkatan kerja di pasar tenaga kerja. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi, akan mampu menyerap 500.000 tenaga kerja. Diperkirakan tahun 2017 saja ada 7 juta orang tidak memiliki pekerjaan. Dengan pertumbuhan 5% setahun maka, hanya 2,5 juta orang yang bisa diserap oleh lapangan kerja per tahun. Artinya, setiap tahun masih ada sekitar 3 juta orang yang menganggur. Jika kita lihat secara umum, dari 255 juta jiwa penduduk Indonesia, angkatan kerja yang ada sebesar 131 juta jiwa, yang bekerja 124 juta orang. Artinya ada 7 juta orang yang mencari kerja (*CNBC Indonesia*, 2024).

Melihat data-data seperti di atas, tampak generasi muda, atau mahasiswa Indonesia di era Jokowi adalah angkatan kerja yang dihantui oleh memburuknya situasi ekonomi, atau sulitnya lapangan kerja akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, mahasiswa juga dihantui oleh semakin menyempitnya ruang politik, karena memburuknya situasi demokrasi (Zhao, 1998).¹ Dengan kata lain, pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi, terutama pada era Jokowi dipersepsikan oleh mahasiswa merusak nilai demokrasi yang sedang mereka nikmati, serta menghempaskan harapan akan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Dengan jumlah mahasiswa sebesar itu, artinya kelompok mahasiswa menjadi strategis

¹ Bandingkan dengan gerakan mahasiswa di Cina pada tahun 1980-an. Zhao mencatat bahwa krisis ekonomi, korupsi para pejabat, inflasi yang tinggi dan jatuhnya status ekonomi kalangan terpelajar telah mendorong mahasiswa di Beijing untuk melancarkan protes besar-besaran di Tiananmen, Beijing.

secara politik. Selain jumlahnya yang cukup signifikan, kelompok mahasiswa memiliki kelebihan lain, yaitu posisinya yang khas dipandang oleh masyarakat, yaitu mahasiswa dipandang sebagai kelompok elite karena merupakan kaum terdidik dan intelektual. Sebagai kaum terdidik, mahasiswa akhirnya dipersepsi sebagai calon pemimpin di masa datang.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah berjalan hampir 10 tahun di tahun 2024 ini. Jokowi meraih kekuasaan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014, ketika demokrasi sedang berkembang baik di Indonesia, pasca pemerintahan Presiden SBY. Masa pemerintahan Jokowi alih-alih dinilai memajukan demokrasi, bagi banyak kalangan sarjana menilai bahwa periode ini membuat demokrasi menjadi mundur.

Thomas P. Power mengemukakan penilaiannya bahwa “hal utama yang menyebabkan kemunduran demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia adalah upaya terang-terangan dari pemerintah nasional yang sedang berkuasa untuk menghimpun dan menggunakan kekuasaan dengan cara yang pada dasarnya anti demokrasi.” Sikap anti demokrasi seperti itu tampak dari “terjadinya pengerahan aparat penegak hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan membatasi aktivitas oposisi, sambil menyerang otoritas hukum dan politik independen lainnya, yang seharusnya bisa berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut” (Power, 2021).

Di samping sikap yang anti demokrasi dan menggunakan hukum dan aparatnya untuk menekan kritik, faktor lain yang menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak demokratis adalah dilemahkannya partai politik. Mengenai melemahnya peran partai politik itu, Marcus Mietzner mencatat, bahwa peran partai politik

sebagai sarana pengontrol kekuasaan secara terlembaga telah merosot. Hal itu tampak dalam tiga hal, pertama sistem kepartaian yang ada telah memarginalkan begitu banyak segmen pemilih dengan menciptakan rintangan semakin besar untuk partai baru. Kedua, penguatan sistem pemilu proporsional terbuka telah meningkatkan personalisasi elektoral (*electoral personalization*). Dengan begitu, partai-partai politik terpaksa memilih tokoh-tokoh nonpartai untuk mewakili mereka dalam pemilu eksekutif dan legislatif. Ketiga, prosedur pengelolaan internal partai yang lemah semakin jauh tergerus, sehingga persaingan untuk kepemimpinan dengan mudah dikendalikan oleh petahana (orang yang sedang menjabat; yang sedang memegang jabatan dalam pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Akibatnya, partai politik menjadi semakin kurang representatif, dan partai-partai telah dilemahkan secara kelembagaan (Mietzner, 2021).

Di tengah menyempitnya ruang demokrasi akibat adanya tekanan dari aparat hukum kepada kebebasan menyatakan pendapat, dan merosotnya peran partai politik untuk mengontrol kekuasaan, membuat mahasiswa muncul ke permukaan untuk mengkritik atau mengontrol kekuasaan. Dengan sendirinya membuat gerakan mahasiswa berhadapan dengan aparat hukum di satu sisi, dan disikapi secara sinis oleh partai politik. Sikap sinis itu tampak dari ungkapan bahwa mahasiswa “ditunggangi” secara politik.

Secara umum, mahasiswa merupakan golongan sosial yang berusia muda dan calon pencari kerja ketika mereka setelah lulus dari universitas. Sebagai orang yang berusia muda, dan calon pencari kerja, mahasiswa selalu merasa gelisah dalam melihat perkembangan ekonomi dan politik. Kegelisahan itu tercipta karena perubahan kondisi ekonomi atau politik bisa mempengaruhi secara langsung masa

depan mereka. Artinya, meskipun tidak semua mahasiswa terlibat dalam gerakan mahasiswa, kegelisahan mereka tetap menjadi energi laten bagi perubahan. Energi ini dapat muncul ke permukaan jika bertemu momentum politik, kepemimpinan yang kuat, dan isu yang tepat. Karena itu, kelompok mahasiswa selalu menarik bagi aktor politik untuk dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kajian atas Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Dalam sejarah politik Indonesia, kemunculan gerakan mahasiswa selalu diawali oleh situasi krisis politik atau terjadinya kemerosotan ekonomi. Francois Raillon mencatat bahwa gerakan mahasiswa yang tumbuh dan berkembang di tahun 1966 tidak terlepas dari terjadinya krisis politik, yang ditandai oleh adanya proses peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, setelah pecahnya peristiwa 1965 (Raillon, 1989). Menurut Raillon, gerakan mahasiswa di tahun 1966 berjalan dalam rangka mendukung terjadinya peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto dalam rangka mengakhiri krisis politik dan ekonomi.

Bahkan lebih jauh, Burhan D. Magenda melihat gerakan mahasiswa sebagai gejala struktural, yaitu gejala yang dipengaruhi perkembangan sosial-budaya Indonesia. Yaitu kehadiran perguruan tinggi yang lebih banyak mendorong lebih banyak lagi orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan menyandang status sebagai mahasiswa. Orang-orang yang masuk perguruan tinggi itu pada waktunya akan mewakili golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan Islam, Priyayi, dan Abangan. Sebagai representasi golongan di universitas, maka “mahasiswa” dilihat identik dengan pekerjaan yang baik dan sukses secara sosial. Akibat perkembangan ekonomi yang memburuk

di tahun ‘60-an, para mahasiswa yang telah bertambah banyak di universitas itu, ketika lulus tidak tertampung dalam lapangan kerja, maka memunculkan kekhawatiran. Kekhawatiran para mahasiswa itu kemudian tersalurkan ke arena politik, dalam bentuk organisasi-organisasi massa, termasuk organisasi himpunan mahasiswa. Magenda menengarai anggota organisasi mahasiswa bertambah secara signifikan di tahun 1960-an (Magenda, 1991).

Marsilam Simandjuntak memandang gerakan mahasiswa 1966 dari kaca mata politik bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut ditandai oleh suksesnya gerakan mahasiswa memancing, menimbulkan suasana, yang memungkinkan terjadinya pemindahan kekuasaan. Perpindahan kekuasaan itu bisa terjadi karena terjadinya kerja sama mahasiswa-ABRI. Karena setiap gerakan massa yang dilakukan mahasiswa saat itu selalu mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari satuan-satuan ABRI. Simandjuntak menegaskan “kesediaan perwira-perwira untuk bertindak dan melindungi” (Simandjuntak, 1991).

Pada gerakan mahasiswa di tahun 1990-an sampai era Reformasi, kerja sama dengan lembaga negara, seperti ABRI itu hilang. Gerakan mahasiswa di akhir masa Orba dan Reformasi merupakan gerakan mahasiswa yang menolak seluruh dominasi militer dalam politik, yaitu menolak dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI adalah tulang punggung sistem politik di masa Orde Baru. Rosidi Riskiandi menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa tahun ‘90-an, yang kemudian melahirkan gerakan Reformasi 1998, terdorong oleh krisis ekonomi dan kritik terhadap dominasi ABRI dalam politik. Gerakan mahasiswa yang memuncak pada 1998 adalah gerakan untuk mengkritik seluruh sendi-sendi politik Orde Baru.

Gerakan mahasiswa 1998 dibangun dari kampus ke kampus sejak jauh hari, yaitu semenjak awal 1990-an. Organ-organ mahasiswa yang terlibat bukan lembaga-lembaga formal kampus, melainkan organ-organ mandiri yang dibentuk di luar kampus. Gerakan itu mengkristal ketika dalam Pemilu 1997, Soeharto kembali dipilih oleh MPR menjadi presiden. Itu artinya Soeharto telah menjadi presiden untuk yang keenam kali masa jabatan. Sementara di sisi lain, ABRI dengan dwifungsinya juga semakin anti demokrasi dan banyak melakukan pemaksaan dan kekerasan kepada masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah aksi penculikan terhadap tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang dilakukan Kopassus antara tahun 1996-1998.

Dalam situasi seperti itu, antara bulan Januari sampai Mei 1998 telah terhubung organisasi-organisasi gerakan mahasiswa dari berbagai kota dan kampus untuk melancarkan demonstrasi-demonstrasi di berbagai kota dengan tema yang sudah hampir seragam, yaitu tolak dwifungsi ABRI, hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tolak Soeharto menjadi presiden.

Sementara Teddy Wibisana, dkk, dalam bukunya *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999*, memberi gambaran bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda tahun '90-an telah bergerak ke luar pakem gerakan mahasiswa tahun '60-an dan '80-an. Gerakan mahasiswa tahun '90-an yang memuncak pada aksi Reformasi 1998, gerakan dibangun bukan lagi bersandar pada elite, melainkan gerakan dibangun bersama dengan unsur di luar kampus, yaitu buruh, petani dan LSM² yang kritis, yang saat itu mulai banyak berdiri (Wibisana, 2022).

Atas gerakan mahasiswa 1996-1998, Anders Uhlin secara umum memandang gerakan mahasiswa telah berhasil menjadi kekuatan politik, dan secara efektif mampu menjadi aktor demokratisasi untuk mendorong dan mengembangkan demokrasi di Indonesia. Bahkan Uhlin juga menjelaskan peran gerakan mahasiswa dan kaitannya dengan ideologi yang menjadi inspirasi mahasiswa kala itu dalam mendorong demokrasi (Uhlin, 1998).

Fenomena Gerakan Mahasiswa

Terpilihnya Jokowi menjadi presiden di tahun 2014 disambut dengan penuh harapan oleh masyarakat. Salah satu faktor yang mendatangkan harapan kepada masyarakat dari terpilihnya Jokowi adalah Jokowi dilihat sebagai sosok sederhana, tidak memiliki beban masa lalu, dan dianggap bisa menjaga keberlangsungan demokrasi.

Namun dalam berjalannya waktu, Jokowi dilihat tidak sebagaimana citra yang dibangun tentang dirinya di saat awal menjadi presiden. Artinya, terjadi perubahan persepsi mengenai sosok Jokowi, dari orang yang sederhana, pro orang kecil, dan pro demokrasi menjadi sebaliknya. Jika kita cermati isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa dalam demonstrasi-demonstrasi yang diadakan, terlihat sosok Jokowi sebagai presiden dipersepsikan sebagai sosok yang pro korupsi karena melemahkan KPK, pro pemodal karena mengesahkan UU Omnibus Ketenagakerjaan, serta otoriter karena membatasi kebebasan berekspresi dan menggunakan aparat hukum untuk menekan gerakan mahasiswa.

Persepsi mengenai watak pemerintah kala itu bisa disimak dalam berbagai liputan media mengenai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan isu-isu yang dilontarkan mahasiswa dalam demonstrasi tersebut.

² LSM itu di antaranya, YLBHI, WALHI, SKEPHI. Paling tidak itu adalah 3 LSM yang saat itu banyak fasilitasnya bisa dipakai oleh tokoh-tokoh gerakan mahasiswa tahun 1990-an.

Salah satu aksi protes mahasiswa yang cukup mendapat perhatian adalah aksi memberi Rapor Merah untuk Jokowi (Aisyah, 2016). Aksi dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), dengan menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, meminta stabilisasi kondisi perekonomian Indonesia. Kedua, nasionalisasi aset sumber daya alam di Mahakam dan Freeport. Ketiga, cabut kebijakan BBM yang berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM. Keempat, selesaikan konflik antarlembaga penegak hukum. Kelima, pertahankan kebijakan pemberian remisi kepada kasus-kasus kejahatan luar biasa, seperti korupsi dan narkoba. Keenam, segera tuntaskan penyelidikan kasus korupsi BLBI dan Bank Century. Ketujuh, mengeluarkan kebijakan di bidang maritim yang pro kepada rakyat, terutama nelayan.

Tujuh tuntutan dari BEM-SI itu dilatari oleh berbagai kebijakan pemerintahan saat itu yang mencabut subsidi BBM ketika harga minyak dunia turun, polemik penunjukan Kapolri dengan KPK, serta pemerintah gagal mencegah pelemahan KPK yang berakibat dijadikannya pimpinan KPK menjadi tersangka. Persepsi mahasiswa dalam BEM-SI itu kemudian terkonfirmasi dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi berada di bidang ekonomi dan politik di bawah 50%. Artinya janji-janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014 tidak berkesesuaian dengan realitas yang ada di tahun 2015 (Aisyah, 2016).

Gerakan Rapor Merah yang digerakkan oleh BEM-SI itu kemudian diberi respons Presiden Jokowi dengan mengundang beberapa organisasi mahasiswa dan BEM ke Istana Negara untuk berdialog mengenai situasi ekonomi dan politik terkini. Pertemuan di istana itu disikapi oleh sebagian organisasi mahasiswa lainnya sebagai bentuk kooptasi

terhadap mahasiswa oleh istana. Karena adanya pesan tidak langsung pemberian fasilitas kepada pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa (Mage, 2020).

Setelah pemanggilan itu, gerakan mahasiswa menentang pemerintahan ternyata tidak surut. Gerakan mahasiswa muncul ke permukaan secara lebih luas dan masif terjadi ketika pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK dan RUU KUHP di bulan September 2019. Demonstrasi besar-besaran diadakan di depan gedung DPR-RI Jakarta. RUU KPK yang hendak disahkan oleh DPR, dinilai mahasiswa sebagai bentuk tidak pemberantasan korupsi. Sementara RUU KUHP ditolak karena masih banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Dalam demonstrasi di depan gedung DPR-RI itu Ketua BEM UI Manik Marganamahendra menyatakan:

“Pertama kita sangat-sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama, makin terancam. Karena dari revisi UU KPK-nya saja tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi, yang justru malah disahkan. Kedua, adanya wacana untuk akhirnya mengesahkan RKUHP, padahal juga pasal-pasal di dalamnya juga masih *ngawur*, banyak yang masih bermasalah. Mulai dari permasalahan korupsi itu sendiri, kemudian masalah demokrasi yang paling kita *highlight*. Dua hal tersebut akhirnya justru malah membuat mosi tidak percaya kita pada negara” (Mustinda, 2019).

Aksi massa mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas ini sudah menunjukkan adanya

rasa tidak percaya kepada Jokowi. Tagar aksi massa mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP itu adalah #reformasidikorupsi³ (Lee dkk, 2016). Demonstrasi terjadi di beberapa daerah, di antaranya Malang, Yogyakarta, dan Bandung (Movanita dan Galih, 2019). Aksi massa di Yogyakarta menggunakan tagar #gajaynmemangil, yang bermakna mengingatkan lagi mahasiswa akan aksi mahasiswa menuntut Soeharto mundur di tahun 1998, yang dilakukan di lokasi itu.

Tuntutan mahasiswa agar UU KPK yang baru disahkan direvisi ditolak oleh presiden (Kompas, 2019). Presiden Jokowi menekankan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan. Alasan pemerintah menolak mengeluarkan Perppu untuk mengubah UU KPK karena revisi UU KPK adalah inisiatif DPR. DPR dan pemerintah telah sepakat mengesahkan revisi UU KPK pada tanggal 17 September 2019. Pengesahan itu dianggap berjalan secara terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari unsur-unsur masyarakat dan unsur pimpinan KPK. Karena pengesahan itu diujung masa jabatan DPR dan presiden, maka bisa dinilai bahwa KPK yang baru sesuai UU KPK, adalah bentuk kompromi politik antara DPR dan presiden.

Demonstrasi menolak pengesahan revisi UU KPK dan RUU KUHP yang terjadi di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Makassar itu kemudian dihadapi dengan keras oleh polisi. Dalam upaya polisi membubarkan demonstrasi, Kompas.com mencatat ada banyak korban, baik luka-luka, maupun meninggal dunia. Artinya telah terjadi demonstrasi sejak tanggal 19 sampai 25 September di berbagai kota untuk menolak pengesahan revisi UU KPK (Kompas, 2019).

³ Penggunaan tagar #reformasidikorupsi menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa telah menggunakan jejaring di media sosial untuk melakukan mobilisasi dan menarik empati masyarakat luas. Gerakan ini memang mendapat dukungan yang luas di media sosial. Mengenai pengaruh media sosial terhadap gerakan mahasiswa.

Isu lain yang ditolak dalam demonstrasi mahasiswa adalah pengesahan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law* yang disahkan bulan Oktober 2020 kembali mendatangkan aksi protes dari mahasiswa. Aksi demonstrasi mahasiswa bersama buruh dilakukan di dekat Patung Kuda, di ujung Jalan Medan Merdeka Barat yang diorganisir oleh BEM-SI. Mereka menolak Omnibus Cipta Kerja, dan meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja tersebut.

Gagasan mengenai UU *Omnibus Law* Cipta Kerja pertama kali dilontarkan Jokowi dalam pidato pelantikannya Oktober 2019 (Kompas, 2023). Sebulan kemudian draf RUU dikirim presiden ke DPR. Setelah pembahasan beberapa bulan, draf UU itu disetujui menjadi UU oleh DPR, dan kemudian disahkan bulan Oktober 2020, menjadi UU No. 11/2000. Namun, RUU Cipta Kerja selama dibahas oleh DPR selalu mendapat penolakan dan protes dari banyak kalangan, terutama kelompok serikat buruh dan mahasiswa (Detik, 2020). Kemudian UU Cipta Kerja digugat ke MK sebanyak sembilan kali oleh serikat buruh serta mahasiswa (Kompas, 2022). Kemudian November 2021, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan pembahasannya cacat formil karena pembahasannya di DPR tidak terbuka. Pemerintah diberi waktu 2 tahun oleh MK untuk memperbaikinya.

Menyikapi putusan MK, presiden mengeluarkan Perppu No. 2/2022 untuk bisa tetap memberlakukan UU Cipta Kerja tersebut. Perppu No. 2/2022 kemudian mendatangkan banyak protes dari kelompok buruh dan mahasiswa secara bersama-sama. Di tengah banyak protes dan demonstrasi penolakan, Perppu tersebut disahkan oleh DPR menjadi UU pada Maret 2023, menjadi

UU No. 6/2023. Artinya, UU Cipta Kerja No. 6/2023 telah melalui jalan berliku untuk bisa disahkan. Hal itu terjadi karena adanya protes dalam bentuk demonstrasi dari kelompok buruh dan mahasiswa dalam waktu yang juga panjang.

Paling tidak, aksi-aksi mahasiswa untuk menolak UU Cipta Kerja terjadi sejak 2020 sampai 2023. Dalam demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR April 2023, sempat mahasiswa melemparkan tikus mati ke halaman gedung DPR. Dalam kesempatan demonstrasi itu ketua BEM UI Melki Sedek menyampaikan:

“Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan kami terhadap seluruh lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif yang membentuk produk hukum secara tertutup, lembaga legislatif yang mempermulus pengesahan Perppu Cipta Kerja, sampai dengan lembaga yudikatif yang seakan-akan tidak dipedulikan oleh lembaga negara lainnya” (*Detik*, 2023).

Gerakan mahasiswa dan kampus kemudian dilihat oleh *Koran Tempo* sebagai bentuk amarah kepada pemerintah (*Koran Tempo*, 2024). Amarah insan kampus itu terjadi karena pemerintah terus menerus melemahkan demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang curang. Kecurangan pemilu itu dilihat mahasiswa implikasi dari keputusan MK tentang uji materi pasal 169 UU Pemilu yang membatasi usia calon presiden dan wakil presiden, berusia 40 tahun. Putusan MK menambahkan norma baru, yaitu pernah menjabat kepala daerah. Keputusan itu memungkinkan anak sulung Jokowi mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, meskipun belum berusia 40 tahun, karena

anaknya adalah Wali Kota Solo. Bahkan amarah itu memunculkan wacana pemakzulan Jokowi dari Presiden. Amarah itu dikumandangkan oleh 40 Kampus, yang berawal dari kampus UGM, Yogyakarta pada 31 Januari 2024.

Protes mahasiswa terhadap putusan MK yang memberi jalan kepada anak Jokowi menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Prabowo menegaskan isu dinasti Jokowi (*Majalah Tempo*, 2023). Aksi mahasiswa menolak dinasti Jokowi muncul hampir secara serentak di ratusan kampus di bulan Januari 2024. Mahasiswa menilai proses Gibran maju cawapres telah menabrak peraturan dengan memanfaatkan koneksi. Mahasiswa juga memandang kehadiran Gibran menjadi cawapres merupakan bentuk pengkhianatan pada reformasi (*Metrotvnews*, 2024). Bahkan, Gerakan Mahasiswa Surabaya menyampaikan tuntutan, agar presiden tidak mempermainkan nilai dan norma hukum sebagai instrumen politik keluarga, menuntut presiden untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024, serta tidak melakukan nepotisme (*Detik*, 2024).

Orientasi Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan

Tidak bisa dimungkiri gerakan mahasiswa semakin masif di Indonesia. Gerakan mahasiswa itu menandakan lahirnya generasi baru. Karakter generasi baru ini adalah pergerakan lintas kampus dengan organisasi internal kampus, yaitu BEM. Untuk melakukan mobilisasi dan menarik simpati publik menggunakan media sosial.

Secara umum gejala maraknya gerakan mahasiswa di pemerintahan Indonesia itu dibaca sebagai reaksi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya adalah kebijakan pelemahan KPK, pembuatan beberapa UU yang terjadi

secara kilat seperti UU Cipta Kerja, dan rusaknya demokrasi karena pemerintah memaksakan kehendaknya dalam rangka mengubah UU melalui MK demi pencalonan anak presiden menjadi cawapres dalam Pemilu 2024.

Gejala rusaknya demokrasi Indonesia ini merupakan faktor pendorong para mahasiswa untuk masuk arena politik dalam rangka mencegah demokrasi rusak lebih parah. Pelemahan KPK dan cepatnya pembahasan UU di DPR dilihat sebagai gejala perusakan demokrasi oleh mahasiswa. Levitsky dan Ziblatt mencatat bahwa kerusakan demokrasi kerap terjadi secara perlahan-lahan. Saat demokrasi mulai rusak, parlemen masih bisa bersidang, koran-koran masih terbit, proses dan prosedur pemilu masih berjalan. Artinya tidak ada gejala yang tampak benar-benar bisa merusak demokrasi. Setiap kebijakan pemerintah selalu disetujui parlemen atau DPR dan semua tampak legal. Bahkan tampak konstitusional, karena melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan langkah-langkah pemerintah itu dilakukan dengan dalih kepentingan publik atau memberantas korupsi (Levitsky dan Ziblatt, 2018).

Namun dalam realitasnya, langkah atau kebijakan pemerintahan Jokowi dipandang oleh mahasiswa melemahkan proses pemberantasan korupsi, karena UU KPK yang baru telah menempatkan KPK di bawah kendali eksekutif. Padahal sebelumnya KPK adalah lembaga independen, dan tidak bergantung pada eksekutif. Sementara DPR dilihat oleh mahasiswa telah berada dalam kendali presiden, hal itu tampak dari kerapnya DPR menyetujui RUU usulan pemerintah secara kilat. Selain itu lembaga peradilan, yaitu MK juga berada dalam pengaruh eksekutif, yang tampak dari keputusan MK yang memberikan jalan kepada anak presiden

untuk bisa maju dalam Pemilu 2024 sebagai cawapres.

Faktor lain yang mendorong mahasiswa masuk arena politik dengan melancarkan demonstrasi massa adalah faktor ekonomi. Ekonomi di masa pemerintahan Jokowi tumbuh stagnan di 5% per tahun. Artinya pemerintahan Jokowi dengan pertumbuhan 5% hanya mampu menyerap angkatan kerja sebesar 500.000 orang. Sementara pertumbuhan angkatan kerja di masa Jokowi sekitar 5,39% atau setara dengan 7,2 juta jiwa. Sedangkan angka pengangguran di 2023, 7,86 juta orang (*CNBC Indonesia*, 2024).

Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja tidak berjalan seimbang. Akibatnya pengangguran terus bertambah. Kondisi itu tentu mencemaskan para mahasiswa yang juga merupakan calon pencari kerja setelah mereka lulus. Bisa dikatakan di mata mahasiswa, pemerintahan kala itu bukanlah pemerintahan yang menjanjikan masa depan yang baik. Hal ini tampak dari kerasnya mahasiswa menolak UU Cipta Kerja yang mereka anggap tidak berpihak kepada pekerja.

Lemahnya DPR berhadapan dengan presiden adalah faktor lain yang mendorong mahasiswa masuk arena politik. Artinya gerakan mahasiswa menguat di masa Jokowi karena DPR melemah. DPR yang semestinya menjalankan peran sebagai pengawas atau pengontrol eksekutif, dipandang mahasiswa telah berubah menjadi pembenar semua langkah presiden. Hal itu tampak dari mulusnya pembahasan RUU yang menguntungkan eksekutif di DPR. Perubahan RUU KPK, dan RUU Cipta Kerja, serta beberapa RUU lainnya menunjukkan DPR melemah terhadap presiden.

Pelemahan DPR itu adalah akibat dari berhasilnya presiden menguasai para ketua

umum partai politik, melalui cara memberi partai politik hadiah jabatan menteri dalam kabinet. Implikasi terjauh dari melemahnya DPR itu adalah melemahnya oposisi dalam politik. Mahasiswa sebagai kelompok penekan dalam kondisi itu, menjelma menjadi kekuatan oposisi, dengan arenanya adalah demonstrasi massa di jalanan.

Jadi, kondisi politik yang mendorong mahasiswa masuk ke arena politik sebagai kelompok penekan di masa Jokowi adalah rusaknya demokrasi, memburuknya kondisi ekonomi, dan mengecilnya kekuatan oposisi. Implikasinya, gerakan mahasiswa menjadi kekuatan politik oposisi dalam rangka mengoreksi demokrasi yang semakin melemah dan merosotnya perekonomian di era itu.

Untuk tiga hal itu, kemudian gerakan mahasiswa sebagai kekuatan penekan (*pressure group*) memainkan perannya. Gerakan mahasiswa berjalan dengan demonstrasi di jalanan, menjalin jaringan intra dan ekstra kampus, dan turut melibatkan elemen masyarakat lainnya, seperti buruh dan pelajar, dalam rangka menguatkan tekanan kepada pemerintah dan DPR. Artinya gerakan mahasiswa tidak berjalan dengan prosedur politik formal, melainkan berjalan dengan aksi-aksi jalanan.

Jika dilihat dari isu-isu yang dilontarkan dan cara-cara yang dipakai, gerakan mahasiswa berupaya mempengaruhi politik formal sebagai sasaran tekanan. Hal itu tampak dari lokasi yang mereka pilih untuk melakukan demonstrasi, yaitu jalanan di depan gedung DPR, KPK dan di depan Istana Presiden. Sementara itu, orientasi gerakan mahasiswa di

era pemerintahan saat ini juga tidak pada figur, melainkan orientasinya mengkritik sistem dan melawan sistem yang dianggap mulai tidak demokratis, permisif pada korupsi dan lalai mengembangkan ekonomi.

Kesimpulan

Gerakan mahasiswa di masa pemerintahan Jokowi telah melahirkan generasi baru. Yaitu, satu generasi yang telah menikmati sistem yang demokratis sebagai hasil dari gerakan Reformasi di tahun 1998. Ketika sistem demokrasi yang telah mereka hormati itu terasa surut. Maka, mereka bereaksi untuk mempertahankan sistem demokrasi tersebut, dengan melancarkan gerakan protes dan demonstrasi kepada pemerintah.

Dalam kerangka mempertahankan atau mencegah demokrasi mundur lebih jauh, maka gerakan mahasiswa menjadi kelompok penekan yang kritis kepada pemerintah. Hal itu tampak dari pemerintah dan DPR yang tidak bisa begitu saja mengesahkan satu UU dan/atau kebijakan. Perlawanan mahasiswa yang didukung oleh elemen masyarakat lainnya, membuat pemerintah kerepotan, dan beberapa kali melakukan perbaikan kebijakan. Misalnya, kebijakan mengenai KPK dan ketenagakerjaan.

Mahasiswa sebagai kelompok penekan akan muncul dan menguat di saat kekuatan oposisi, baik di parlemen maupun dari partai politik melemah. Hal ini tampak dari besarnya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa melawan kebijakan pemerintah ketika DPR dan partai politik sekadar menjadi pembenar kebijakan pemerintah.

Referensi

- Aisyah, N. (2016). Orientasi gerakan mahasiswa: Rapor merah Jokowi oleh BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jatim Maret 2015. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 177–194.
- Bisnis Indonesia. (2024). *Bisnis Indonesia Economic & Financial Report (2014-2024)*. PT Jurnalindo Aksara Grafika. <https://assets.dataindonesia.id/2024/12/23/1734927646053-28-Bisnis-Indonesia-Economic--Financial-Report-2014-2024-lowres.pdf>
- CNBC Indonesia. (2024, Agustus 13). Cela di balik pertumbuhan ekonomi 5% Jokowi. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240812222531-4-562479/cela-di-balik-pertumbuhan-ekonomi-5-jokowi>
- Detik.com. (2020, November 3). Perjalanan UU Ciptakerja: Disahkan DPR hingga diteken Jokowi. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>
- Detik.com. (2023, April 6). Mahasiswa demo tolak UU Ciptaker lempar tikus mati ke DPR. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6659797/mahasiswa-demo-tolak-uu-ciptaker-lempar-tikus-mati-ke-dpr>
- Detik.com. (2024, Februari 9). Gerakan Surabaya melawan demo di Taman Apasari, tolak politik dinasti. Detik.com. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7185231/gerakan-surabaya-melawan-demo-di-taman-apasari-tolak-politik-dinasti>
- Key, V. O., Jr. (1958). *Politics, parties and pressure groups*. New York, NY: Thomas Y. Crowell Company. (Dikutip dari Husin, L. H. (2014). *Gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan: Keluarga Mahasiswa UGM dari masa Orde Lama hingga pasca-Reformasi*. Yogyakarta: PolGov).
- Kompas.com. (2019, September 23). Presiden Jokowi tolak tuntutan untuk cabut UU KPK. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/18325521/presiden-jokowi-tolak-tuntutan-untuk-cabut-uu-kpk?page=all>
- Kompas.com. (2019, September 25). Demo UU KPK dan RKUHP, 232 orang jadi korban, 3 dikabarkan kritis. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all>
- Kompas.com. (2022, Februari 11). Sembilan gugatan UU Cipta Kerja di MK selama 2021, hanya satu dikabulkan sebagian. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/20472591/sembilan-gugatan-uu-cipta-kerja-di-mk-selama-2021-hanya-satu-dikabulkan?page=all>
- Kompas.com. (2023, Maret 21). Jejak kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan secara kilat, Perppu diketok meski banjir penolakan. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>
- Koran Tempo. (2024, Februari 10). Amarah kampus kepada Jokowi. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/gerakan-mahasiswa-kritik-jokowi-meluas-408397>

- Lee, F. L. F., Chen, H.-T., & Chan, M. (2016). Social media use and university students' participation in a large-scale campaign: The case of Hong Kong's Umbrella Movement. *Telematics and Informatics*, 33(2), 626–641. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.005>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. New York, NY: Penguin Random House.
- Mage, R. I. (2020). Meredupnya gerakan mahasiswa pasca pemilihan presiden 2014. *Jurnal Akses*, 12(2), 45–60. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/download/679/628>
- Magenda, B. D. (1991). Gerakan mahasiswa dan hubungan dengan sistem politik: Suatu tinjauan. Dalam F. Bulkin (Ed.), *Analisa kekuatan politik di Indonesia* (hlm. 117–147). Jakarta: LP3ES.
- Metrotvnews.com. (2024, Januari 12). Demo tolak dinasti politik dan pelanggaran HAM bergema di sejumlah daerah. MetroTVNews.com. <https://www.metrotvnews.com/play/b3JCr22Y-demo-tolak-dinasti-politik-pelanggar-ham-bergema-di-sejumlah-daerah>
- Mietzner, M. (2021). Meninjau kembali partai politik di Indonesia: Eksklusivisme sistemik, personalisasi pemilu, dan merosotnya demokrasi intra-partai. Dalam T. Power & E. Warburton (Eds.), *Demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi* (hlm. 268–269). Jakarta: KPG.
- Movanita, N. K., & Galih, B. (2019, September 24). Ramai-ramai turun ke jalan, apa yang dituntut mahasiswa? Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan-apa-yang-dituntut-mahasiswa>
- Mustinda, L. (2019, September 20). Seputar demo mahasiswa yang tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>
- Power, T. P. (2021). Serangan atas akuntabilitas: Politisasi penegakan hukum, pemaksaan partisan, dan penge-lambungan kekuasaan eksekutif di bawah pemerintahan Jokowi. Dalam T. Power & E. Warburton (Eds.), *Demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi* (hlm. 390–391). Jakarta: KPG.
- Raillon, F. (1989). *Politik dan ideologi mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan konsolidasi Orde Baru 1966–1974*. Jakarta: LP3ES.
- Rizkiandi, R. (2016). *Mahasiswa dalam pusaran reformasi 1998: Kisah yang tak terungkap*. Jakarta: UIPress.
- Simandjuntak, M. (1991). Gerakan mahasiswa: Mencari definisi? Dalam F. Bulkin (Ed.), *Analisa kekuatan politik di Indonesia* (hlm. 83–116). Jakarta: LP3ES.
- Sindonews.com. (2023, Juli 27). Disebut aset masa depan bangsa, berapa jumlah mahasiswa di Indonesia? Ini sebarannya. SindoNews.com. <https://edukasi.sindonews.com/read/1161347/211/disebut-aset-masa-depan-bangsa-berapa-jumlah-mahasiswa-di-indonesia-ini-sebarannya-1690423649>
- Tempo. (2023, Desember 31). Cara aktivis mahasiswa melawan politik dinasti Jokowi. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/aktivis-mahasiswa-politik-dinasti-403743>

- Uhlin, A. (1998). *Oposisi berserak: Arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wibisana, T., dkk. (2022). *ALDERA: Potret gerakan politik kaum muda, 1993–1999*. Jakarta: Kompas.
- Zhao, D. (1998). Ecologies of social movements: Student mobilization during 1989 pro-democracy movement in Beijing. *American Journal of Sociology*, 103(6), 1493–1529. <https://doi.org/10.1086/231400>

Modi be
Bowl

poter d



BBK
BBK

7

9

BBK

t

BBK

BBK